



RENCANA KERJA



**RENJA
2021**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

દ્વારા પ્રદૂષણ નિયમો

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email: inspektorat@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55286

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 48 / KPTS / 2020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-3
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2019.....	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan.....	2-1
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	2-3
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	3-7
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	3-7
3.2. Program dan Kegiatan	3-8
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	4-1
BAB 5 PENUTUP	4-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Tahun 2019	2-2
Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Inspektorat DIY	2-6
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju	3-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Susunan Organisasi Inspektorat DIY 2-4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (common goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rancangan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Perubahan Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Inspektorat DIY Tahun 2021 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 59).
12. Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/KPTS/2020 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan RKPD, Inspektorat DIY menyusun Renja SKPD Tahun 2021 dengan maksud melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2021.

Sistematika Penulisan

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2019
- Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab 5 Penutup

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DIY TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mewujudkan *good governance* telah dituangkan dalam Renstra dan penjabaran perencanaan tahun melalui Renja Inspektorat. Sasaran strategis Inspektorat dalam Renstra perubahan tahun 2017-2022 adalah meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator kinerja yang ditetapkan prosentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.

2.2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai yang telah dilaksanakannya suatu program/kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2019 ditetapkan satu sasaran strategis, satu indikator kinerja, 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2019 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp28.316.950.651,00 atau 82,83% dari alokasi anggaran Rp34.185.032.293,00. Anggaran tersebut terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp5.736.941.642,00 dan belanja langsung sebesar Rp28.448.090.651,00.

Pencapaian hasil realisasi kinerja tahun 2019 sesuai indikator kinerja kegiatan dan target pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1. Pencapaian Hasil Kinerja Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
01.033	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Tertataanya Arsip Aktif / In Aktif - Alat tulis kantor - Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor - Pembelian Meterai - Pengiriman surat khusus/perangko - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Pengisian tabung pemadam kebakaran - Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 - Tagihan internet up to 2 MBps - Paket pengiriman - Retribusi sampah kantor - Pajak/STNK kendaraan/operasional roda 2 - Pajak/STNK kendaraan/operasional roda 4 - Barang cetakan - Penggandaan dokumen dokumen 	12 bulan 13 jenis 6 jenis 320 lembar 300 Surat 5 jenis 3 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 unit 13 unit 9 jenis 71.360 lembar	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
01.034	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundungan yang berlaku - Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundungan yang berlaku - Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundungan yang berlaku - Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundungan yang berlaku - Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundungan yang berlaku - Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK - Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK 	9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 10 orang 5 orang	9 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 10 orang 5 orang
01.035	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan - Konsultasi dan koordinasi luar daerah terlaksana dengan baik 	1 tahun 1 tahun	100% 100%
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	99.99%
02.107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Tempat Kerja seluas 3.675 m ²	Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja Tahap I 100%	100%
02.111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD 	1 jenis 8 jenis	1 jenis 8 jenis
02.112	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD - Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 13 unit 	5 unit 13 unit	5 unit 13 unit
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
05.007	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek 	5 orang 4 angkatan 70 orang	5 orang 4 angkatan 70 orang
05.072	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	2 periode @ 50 orang	100%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%
06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Nilai LKJIP A	100%
06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	Laporan Keuangan SKPD dengan deviasi 5%	100%
06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Perencanaan OPD 1 kali - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPRA yang sesuai dengan aturan yang berlaku 	kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD th 2020 Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan TA 2019	100% 100%
06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	100%
38.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Saran dan Prasarana	82%	90.07%
38.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKJIP Pemerintah Daerah DIY - Peer Review antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD - Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD 	190 LHP 41 LHE 2 Laporan 41 laporan 2 laporan 41 laporan 41 laporan	190 LHP 41 LHE 2 Laporan 41 laporan 2 laporan 41 laporan 41 laporan
38.009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan EKPPD kabupaten/kota	5 laporan	5 laporan
38.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi hasil pengawasan - Rekapitulasi hasil tindaklanjut temuan pengawasan 	1 laporan 3 laporan	1 laporan 3 laporan
38.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%
38.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	65 LHP	63 LHP

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
38.016	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 - Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat - Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2020 	1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan 4 laporan 1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan 4 laporan - 1 laporan

Pada tahun 2019 dari target kinerja kegiatan yang direncanakan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaiannya tidak 100%, yaitu :

- a. Kegiatan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah, dari target yang direncanakan 65 LHP terealisasi 63 LHP karena kegiatan pemeriksaan khusus/kasus untuk memfasilitasi kegiatan mandatori Inspektorat sebagai APIP dan tergantung dari pengaduan masyarakat yang masuk dan akan diriksuskan.
- b. Kegiatan Pengawasan Manejeman Pelaksanaan Kebijakan KDH, target Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tidak terlaksana karena survey ini merupakan survey penilaian integritas yang bekerjasama dengan KPK dan BPS dari anggaran yang tersedia di DPA Inspektorat tahun 2019 tidak mencukupi untuk melaksanakan survey dimaksud dan dari tatakala pelaksanaan survey tidak mungkin dilaksanakan setelah perubahan anggaran. Hal tersebut telah dilakukan efisiensi.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja s.d. 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Tabel2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2019 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTOR AT

Lembar : 1

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8+10)	12=(11/5)
1		Urusan Pemerintahan										
1	01	Bidang Urusan Pemerintahan										
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400.90%	80.18%
1	01	01	01	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Tertatinya Arsip Aktif / In Aktif 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	405.06%	81.01%
				Alat tulis kantor 19 jenis								
				Komponen instalasi listrik dan bangunan kantor 12 jenis								
				Pembelian Meterai								
				Pengiriman surat khusus perangko								
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih								

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

				1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8+10)	12=(11/5)
						Pengisian tabung pemadam kebakaran									
						Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3									
						Langganan 4 jenis surat kabar harian									
						Tagihan internet up to 2 MBps									
						Paket pengiriman									
						Retribusi sampah kantor									
						Jasa kebersihan gedung kantor									
						Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2									
						Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4									
						Barang cetakan									
						Penggandaan dokumen dokumen									
						Fumigasi arsip/Arsip terdigitalisasi									
						Pembelian buku									
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Kinerja 1 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400.55%	80.11%	
					Kinerja 9 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku										
					Kinerja 9 orang keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK										
					Kinerja 1 orang pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku										
					Kinerja 1 orang penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku										
					Kinerja 1 orang perencana program dalam 1 tahun										
1	01	01	03	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400.17%	80.03%	
					Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik selama 1 tahun										

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8+10)	12=(11/5)
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400.18%	80.03%
1	01	02	107	Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	D E D gedung Kantor/Gedung Kantor	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	300.01%	75.00%
					Terselesaikannya pembangunan gedung tempat bekerja	-	-							
1	01	02	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 1 jenis	100%		-	-	-	-	100%	200%	66.67%
					Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis									
					Meubeleir sesuai RKBMD 2 jenis									
1	01	02	109	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Perawatan garasi kendaraan dinas 150 m ² ,	100%		-	-	-	-	-	100%	-
1	01	02	111	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	AC Split sesuai RKBMD 30 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	406.81%	81.36%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD 13 jenis									
1	01	02	113	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD 5 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	411.82%	82.36%
					Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD 15 unit									
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	404.73%	80.95%
1	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 10	100%		-	-	-	-	-	-	-
1	01	05	003	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat : 5 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	404.81%	80.95%
					Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek : 2 angkatan 55 org									
1	01	05	007	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=[5+6+8+10]	12=(11/5)
1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	401.85%	80.37%
1	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMP, Renstra dan IKU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%
1	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	446.11%	89.22%
1	01	06	018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%
					Dokumen draft Renstra yang sesuai dengan RPJMD 2018-2022									
1	01	06	019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%
1	01	38		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	90%	98.96%	111.28%	82%	90.07%	109.84%	85%	464.04%	92.81%
1	01	38	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	407.65%	81.53%
					Laporan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016									
					Laporan Evaluasi LKjIP									
					Laporan Hasil Pendampingan									
					Laporan Review Laporan Keuangan SKPD DIY									
					Laporan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY									
					Laporan Review RKA SKPD DIY									
					Laporan Monev SPIP SKPD									
					Laporan Telaah sejawat antar Inspektorat Provinsi									
					Laporan Pendampingan Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY SKPD									

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1				2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(5+6+8+10)	12=(11/5)
					Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD									
					Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD									
					Consulting dan Quality Assurance Pengawasan SKPD									
1	01	38	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi	100%	100%	100%	100%	99.98%	99.98%	100%	400.43%	80.08%
					Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah									
					Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018									
					Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu									
1	01	38	007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	01	38	009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%
1	01	38	010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi hasil pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%
					Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan									
1	01	38	011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	406.27%	81.25%
					Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS 5500 PNS									
1	01	38	014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	400%	80%

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Inspektorat sampai dengan bulan Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 190 obyek pemeriksaan, melakukan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 terhadap 37 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2019 terdapat 979 rekomendasi BPK dan telah ditindak lanjuti sejumlah 758 (77.43%), rekomendasi Inspektorat sebanyak 1.119 rekomendasi selesai ditindaklanjuti 1.038 (92.80%) serta rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemendagri sebanyak 11 rekomendasi, selesai ditindaklanuti 11 (100%).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat DIY tahun 2019 telah melakukan :

- a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
- b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.
- c. Melakukan Evaluasi LKJiP Pemda DIY.
- d. Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY
- e. Reviu Dokumen Perencanaan SKPD Pemda DIY

- f. Reviu RKA SKPD DIY
- g. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- h. Evaluasi LKJiP Kabupaten/ Kota
- i. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
- j. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
- k. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

- a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.
- b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. *Consulting* dan *Quality Assurance*.
- d. Melakukan Kas Opname dan Stok Opname.
- e. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

Pada tahun 2019 Inspektorat DIY juga melaksanakan kegiatan- kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- b. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Derah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- f. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

- g. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.
- h. Melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkerjasama dengan Irwasda POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Ombudsman DIY dan Badan Intelijen Negara Daerah DIY.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 16 (3) disebutkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategi nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

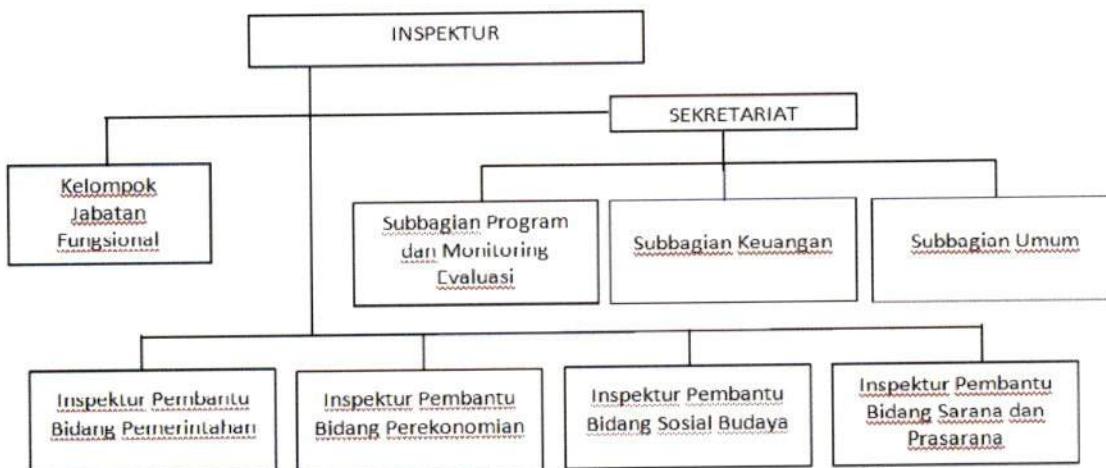
Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta pada BAB II Pasal 9 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pimpinan : Inspektur
2. Inspektur Pembantu : Terdiri dari 4 Inspektur Pembantu Bidang :
 - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
 - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
 - Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
 - Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
3. Sekretariat : Terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Inspektorat DIY



2.4.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat pada BAB III Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Selanjutnya pada pasal 5, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- g. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

2.4.2. Keadaan Pegawai

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang pada akhir Juni 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	35
		P2UPD	16
3	Fungsional Umum	Staf	18
	Jumlah		82

2.4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

- a. Gedung : 1 unit
- b. Kendaraan roda 4 : 13 unit
- c. Kendaraan roda 2 : 4 buah
- d. Komputer yang dapat digunakan : 31 unit
- e. Laptop yang dapat digunakan : 52 unit
- f. AC yang dapat digunakan : 22 buah

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Inspektorat untuk sementara mulai bulan Desember 2018 Inspektorat DIY menempati Gedung milik Badan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY di Komplek Youth Centre, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, pembangunan Gedung Inspektorat telah dimulai pada tahun 2019 masih berupa pembangunan konstruksi gedung, sedang pada tahun 2020 ditunda pelaksanaannya terkait kondisi darurat Covid-19 dan pada tahun 2021 diusulkan kembali.
2. Untuk kendaraan dinas operasional (roda 4) pemeriksaan dari 13 unit kendaraan tersebut, 1 (unit) kendaraan roda 4 merupakan kendaraan dinas Eselon II. Hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran ketika melakukan pemeriksaan ke seluruh SKPD/UPTD Pemda DIY yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kendaraan dinas roda 2 digunakan oleh caraka.
3. Lap top yang dimiliki Inspektorat DIY sebanyak 52 unit, terdapat 19 unit merupakan pengadaan tahun 2008 dan 2009 yang sering mengalami kerusakan sehingga menghambat dalam penyusunan LHP dan biaya pemeliharaan yang tinggi dan pada triwulan I 2020 Inspektorat telah mengadaan laptop sebanyak 30 unit yang digunakan untuk para pejabat struktural, pengendali teknis dan ketua tim pemeriksaan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lancar.
4. Komputer PC sampai saat ini yang masih berfungsi dengan baik sebanyak 31 unit, yang sebelumnya 40 unit karena pada tahun 2020 telah diusulkan penghapusan (kondisi rusak berat) sebanyak 9 unit.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

Sebagaimana visi Pembangunan DIY “ *Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*” .

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, tujuannya adalah terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian ditetapkan sasarnya adalah meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal.

Sedangkan sasaran program 01 s.d 06 adalah ***Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD.***

3.2. Program dan Kegiatan

a. Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat DIY pada tahun anggaran 2021 ada 5 (lima) sebagai berikut :

- 1) Program Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan

b. Kegiatan.

Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.602.849.650,00. Belanja Langsung 5 (lima) Program 19 (sembilan belas) kegiatan dengan rencana anggaran Rp29.279.484.000,00. Sehingga Total Anggaran sebesar Rp35.882.333.650,00.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran;
2. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran;
3. Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi;
4. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor;

5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan;
7. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
8. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu;
9. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
10. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD;
11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
12. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi;
13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD;
14. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
15. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
16. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
18. Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
19. Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Inspektorat tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
01.	Program Administrasi Perkantoran							1,384,060,000	1,830,327,911		
01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Pembelian Materai 02. Alat tulis kantor 03. Barang cetakan 04. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional 05. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional 06. Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 07. Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya 08. Jumlah materai yang digandakan 09. Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 10. Pengisian tabung pemadam kebakaran	320 lembar 21 jenis 7 jenis 4 unit 13 unit 12 bulan 12 bulan 71.360 lembar 6 jenis 3 buah	Dukungan 33.84% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	250,964,000	430,710,911		
01.002	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 18.19% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	666,574,000	449,617,000		
01.003	Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi 02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan 12 bulan	Dukungan 47.96% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	466,522,000	950,000,000		

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
01.	Program Administrasi Perkantoran							1,384,060,000	1,830,327,911		
01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	01. Pembelian Materai 02. Alat tulis kantor 03. Barang cetakan 04. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional 05. Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan operasional 06. Bukti pembayaran rekening telepon 5 sambungan, rekening listrik 500 Kwh, rekening air 10 m3 07. Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya 08. Jumlah materai yang digandakan 09. Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor 10. Pengisian tabung pemadam kebakaran	320 lembar 21 jenis 7 jenis 4 unit 13 unit 12 bulan 12 bulan 71.360 lembar 6 jenis 3 buah	Dukungan 33.84% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	250.964,000	430.710.911		
01.002	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	Dukungan 18.19% terhadap terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	666.574,000	449.617.000		
01.003	Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		01. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi dan koordinasi 02. Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi	12 bulan 12 bulan	Dukungan 47.96% terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	466.522,000	950.000.000		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
16.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pemerintahan							6,479,769,000	8,012,017,340		
16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonominian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	01. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY 02. Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD 03. Laporan Evaluasi SAKIP OPD 04. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler 05. Laporan hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD 06. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 07. Laporan Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY 08. Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY sebelum penghantaran RAPBD TA 2022 09. Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda 10. Laporan Telaah Sejawat Kabupaten / Kota 11. Telaah Sejawat Antar Inspektorat Propinsi	1 LHE 37 Laporan 37 Laporan 190 LHP 37 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 37 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Dukungan 74,06% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	5,162,056,000	5,885,914,340		
16.002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonominian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	01. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021 02. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2019 03. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa 04. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi 05. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah 06. Survey Penilaian Integritas 07. Laporan Triwulan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu	1 SK Gubernur 1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	Dukungan 12.08% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	434,084,000	957,582,000		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju		
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
16.003	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	5 laporan	Dukungan 2.32% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	50,244,000	184,654,000		
16.004	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	01. Laporan Gelar Pengawasan Daerah 02. Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan	1 Laporan 2 laporan	Dukungan 1.43% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	63,911,000	113,495,000		
16.005	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi temuan hasil pengawasan	2 laporan	Dukungan 0.38% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	15,246,000	33,894,000		
16.007	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	- Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian - Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	88%	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	90 LHP	Dukungan 9.72% terhadap prosentase kinerja perangkat daerah pemerintahan, sosial budaya, perekonomian, serta sarana dan prasarana sebesar 88%	100%	754,228,000	836,478,000		
		Total						28,279,484,000	15,965,435,524		

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY menjabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021. Pada Rencana Kerja tahun 2021 direncanakan melaksanakan 5 (lima) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan sumber dana APBD DIY sebesar Rp35.882.333.650,00. yang terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 6.602.849.650,00
2. Belanja langsung sebesar Rp 28.279.484.000,00

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat tahun 2021, dengan rincian kebutuhan dana sebagai berikut:

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan			
	Inspektorat		Rp 36,003,639,650,00	
A.	Belanja Langsung		Rp 6,602,849,650,00	APBD
B.	Belanja Tidak Langsung		Rp 29,400,790,000,00	APBD
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 1,384,060,000,00	APBD
1.1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Inspektorat	Rp 250,964,000,00	APBD
1.2.	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Inspektorat	Rp 666,574,000,00	APBD
1.3.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi Dan Konsultasi	Inspektorat	Rp 466,522,000,00	APBD
2.	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 19,879,534,000,00	APBD
2.1.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Inspektorat	Rp 19,489,982,000,00	APBD
2.2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Inspektorat	Rp 10,474,000,00	APBD
2.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Inspektorat	Rp 59,750,000,00	APBD
2.4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat	Rp 319,328,000,00	APBD
3.	Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Rp 352,491,000,00	APBD
3.1.	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Inspektorat	Rp 335,139,000,00	APBD
3.2.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Inspektorat	Rp 17,352,000,00	APBD

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		Rp 183,630,000.00	APBD
4.1.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Inspektorat	Rp 3,558,000.00	APBD
4.2.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Inspektorat	Rp 5,336,000.00	APBD
4.3.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Inspektorat	Rp 169,776,000.00	APBD
4.4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Inspektorat	Rp 4,960,000.00	APBD
5.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan		Rp 6,479,769,000.00	APBD
5.1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektorat	Rp 5,162,056,000.00	APBD
5.2.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	Inspektorat	Rp 434,084,000.00	APBD
5.3.	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Rp 50,244,000.00	APBD
5.4.	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Rp 63,911,000.00	APBD
5.5.	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Rp 15,246,000.00	APBD
5.6.	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Rp 754,228,000.00	APBD

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun keempat periode Renstra Inspektorat 2017-2022 yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta. Renja ini menjadi pedoman/acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat serta penyusunan rencana kerja kegiatan tahun 2021.

Renja ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan dalam mencapai visi, misi perangkat daerah dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan yang direncanakan.



RENCANA KERJA **RENJA** **2021**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Ճայպարհական վարչություն

Alamat Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung,
Tlogodadi, Mlati, Kabupaten Sleman Kode Pos 55286
Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567
Website <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>
Email inspektorat@jogjaprov.go.id